



BUPATI SAMBAS

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 57 TAHUN 2015  
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2016
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2009 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2009 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 18);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2016**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Sambas ini.

#### Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

#### Pasal 4

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

#### Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

## Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab/kota - ADkab/kota)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z4 = rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG kabupaten/kota yang memiliki Desa

DDkab/kota = pagu Dana Desa kabupaten/kota

ADkab/kota = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten/kota

## Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

## Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
  - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati .
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
  - c. Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.



- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati.
  - laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh per seratus).
  - Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada bupati/ walikota paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (6) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II kepada Bupati.
  - Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
  - Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati.
- (7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

#### Pasal 9

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa sesuai dengan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai bidang pembangunan sebagaimana pada ayat (1), meliputi :
- Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
  - Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
  - Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
  - Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/ atau
  - Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energy terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

6. Bidang kegiatan pembangunan lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana pada ayat (1), meliputi :
1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
  2. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa bersama, maupun oleh kelompok dan/ atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
  3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
  4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (Community Centre);
  5. Promosi dan Edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes, dan ketersediaan atau kebergungsiannya tenaga medis/ swamedikasi di Desa;
  6. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/ atau
  7. Bidang Kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penggunaan Dana Desa sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3) dapat ditambahkan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

#### Pasal 10

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/ atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

#### Pasal 11

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

## Pasal 12

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 13

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati .
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
  - b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan.
  - c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.

## Pasal 15

- (1) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (2) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (3) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Sambas Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 29 Desember 2015

BUPATI SAMBAS

TTD


JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 29 Desember 2015  
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

ARLIZEN, AB  
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 57

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN PERUNDANG-UNDANGAN

  
MARIANIS  
Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMBAS  
 NOMOR 57 TAHUN 2015  
 TANGGAL 29 DESEMBER 2015  
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
 RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
 DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN  
 2016

**ALOKASI PAGU DANA DESA KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	SAMBAS	DALAM KAUM	Rp 565,640,000.00	Rp 49,253,041.00	Rp 614,893,041.00
2	SAMBAS	LUBUK DAGANG	Rp 565,640,000.00	Rp 57,787,762.00	Rp 623,427,762.00
3	SAMBAS	TANJUNG BUGIS	Rp 565,640,000.00	Rp 36,810,264.00	Rp 602,450,264.00
4	SAMBAS	PENDAWAN	Rp 565,640,000.00	Rp 29,808,197.00	Rp 595,448,197.00
5	SAMBAS	PASAR MELAYU	Rp 565,640,000.00	Rp 18,677,034.00	Rp 584,317,034.00
6	SAMBAS	DURIAN	Rp 565,640,000.00	Rp 25,750,060.00	Rp 591,390,060.00
7	SAMBAS	LORONG	Rp 565,640,000.00	Rp 58,219,186.00	Rp 623,859,186.00
8	SAMBAS	JAGUR	Rp 565,640,000.00	Rp 19,287,247.00	Rp 584,927,247.00
9	SAMBAS	TUMUK MANGGIS	Rp 565,640,000.00	Rp 16,817,952.00	Rp 582,457,952.00
10	SAMBAS	TANJUNG MEKAR	Rp 565,640,000.00	Rp 27,948,213.00	Rp 593,588,213.00
11	SAMBAS	SEBAYAN	Rp 565,640,000.00	Rp 62,278,348.00	Rp 627,918,348.00
12	SAMBAS	KARTIASA	Rp 565,640,000.00	Rp 89,772,829.00	Rp 655,412,829.00
13	SAMBAS	SAING RAMBI	Rp 565,640,000.00	Rp 44,126,216.00	Rp 609,766,216.00
14	SAMBAS	LUMBANG	Rp 565,640,000.00	Rp 82,651,494.00	Rp 648,291,494.00
15	SAMBAS	SUNGAI RAMBAH	Rp 565,640,000.00	Rp 78,364,711.00	Rp 644,004,711.00
16	SAMBAS	GAPURA	Rp 565,640,000.00	Rp 82,261,216.00	Rp 647,901,216.00
17	SAMBAS	SUMBER HARAPAN	Rp 565,640,000.00	Rp 59,012,741.00	Rp 624,652,741.00
18	SAMBAS	SEMANGAU	Rp 565,640,000.00	Rp 30,459,532.00	Rp 596,099,532.00
19	TELUK KERAMAT	SUNGAI KUMPAI	Rp 565,640,000.00	Rp 50,020,373.00	Rp 615,660,373.00
20	TELUK KERAMAT	SEKURA	Rp 565,640,000.00	Rp 70,698,499.00	Rp 636,338,499.00
21	TELUK KERAMAT	TRI MANDAYAN	Rp 565,640,000.00	Rp 57,080,850.00	Rp 622,720,850.00
22	TELUK KERAMAT	PEDADA	Rp 565,640,000.00	Rp 33,701,716.00	Rp 599,341,716.00
23	TELUK KERAMAT	LELA	Rp 565,640,000.00	Rp 49,068,474.00	Rp 614,708,474.00
24	TELUK KERAMAT	PURINGAN	Rp 565,640,000.00	Rp 36,656,924.00	Rp 602,296,924.00
25	TELUK KERAMAT	BERLIMANG	Rp 565,640,000.00	Rp 43,827,186.00	Rp 609,467,186.00
26	TELUK KERAMAT	SUNGAI BARU	Rp 565,640,000.00	Rp 52,412,481.00	Rp 618,052,481.00
27	TELUK KERAMAT	SENGAWANG	Rp 565,640,000.00	Rp 60,975,090.00	Rp 626,615,090.00
28	TELUK KERAMAT	TELUK KASEH	Rp 565,640,000.00	Rp 44,281,455.00	Rp 609,921,455.00
29	TELUK KERAMAT	SEPADU	Rp 565,640,000.00	Rp 25,637,462.00	Rp 591,277,462.00
30	TELUK KERAMAT	TAMBATAN	Rp 565,640,000.00	Rp 33,779,401.00	Rp 599,419,401.00
31	TELUK KERAMAT	KUBANGGA	Rp 565,640,000.00	Rp 42,693,738.00	Rp 608,333,738.00
32	TELUK KERAMAT	SUNGAI SERABEK	Rp 565,640,000.00	Rp 43,142,509.00	Rp 608,782,509.00
33	TELUK KERAMAT	SAYANG SEDAYU	Rp 565,640,000.00	Rp 35,723,018.00	Rp 601,363,018.00
34	TELUK KERAMAT	PIPIT TEJA	Rp 565,640,000.00	Rp 38,552,889.00	Rp 604,192,889.00
35	TELUK KERAMAT	MATANG SEGANTAR	Rp 565,640,000.00	Rp 32,463,405.00	Rp 598,103,405.00
36	TELUK KERAMAT	MULIA	Rp 565,640,000.00	Rp 37,722,311.00	Rp 603,362,311.00
37	TELUK KERAMAT	TELUK KUMBANG	Rp 565,640,000.00	Rp 43,930,168.00	Rp 609,570,168.00
38	TELUK KERAMAT	SAMUSTIDA	Rp 565,640,000.00	Rp 68,904,964.00	Rp 634,544,964.00
39	TELUK KERAMAT	TANJUNG KERUCUT	Rp 565,640,000.00	Rp 47,222,352.00	Rp 612,862,352.00
40	TELUK KERAMAT	SEBAGU	Rp 565,640,000.00	Rp 30,735,544.00	Rp 596,375,544.00
41	TELUK KERAMAT	MEKAR SEKUNTUM	Rp 565,640,000.00	Rp 60,074,123.00	Rp 625,714,123.00
42	TELUK KERAMAT	KUALA PANGKALAN	Rp 565,640,000.00	Rp 43,938,711.00	Rp 609,578,711.00
43	TELUK KERAMAT	SABING	Rp 565,640,000.00	Rp 33,534,793.00	Rp 599,174,793.00
44	JAWAI	SARANG BURUNG DANAU	Rp 565,640,000.00	Rp 90,068,283.00	Rp 655,708,283.00
45	JAWAI	SUNGAI NILAM	Rp 565,640,000.00	Rp 52,118,170.00	Rp 617,758,170.00
46	JAWAI	SARANG BURUNG KOLAM	Rp 565,640,000.00	Rp 74,440,651.00	Rp 640,080,651.00
47	JAWAI	SARANG BURUNG USRAT	Rp 565,640,000.00	Rp 49,116,480.00	Rp 614,756,480.00
48	JAWAI	SARANG BURUNG KUALA	Rp 565,640,000.00	Rp 42,218,955.00	Rp 607,858,955.00
49	JAWAI	PELIMPAAN	Rp 565,640,000.00	Rp 74,760,390.00	Rp 640,400,390.00
50	JAWAI	PARIT SETIA	Rp 565,640,000.00	Rp 57,275,390.00	Rp 622,915,390.00
51	JAWAI	BAKAU	Rp 565,640,000.00	Rp 59,509,556.00	Rp 625,149,556.00
52	JAWAI	SUNGAI NYIRIH	Rp 565,640,000.00	Rp 55,576,536.00	Rp 621,216,536.00
53	JAWAI	SENTEBANG	Rp 565,640,000.00	Rp 93,009,983.00	Rp 658,649,983.00



54	JAWAI	DUNGUN LAUT	Rp 565,640,000.00	Rp 50,831,869.00	Rp 616,471,869.00
55	JAWAI	LAMBAU	Rp 565,640,000.00	Rp 43,096,905.00	Rp 608,736,905.00
56	JAWAI	MUTUS DARUSSALAM	Rp 565,640,000.00	Rp 41,202,864.00	Rp 606,842,864.00
57	TEBAS	TEBAS KUALA	Rp 565,640,000.00	Rp 79,029,064.00	Rp 644,669,064.00
58	TEBAS	TEBAS SUNGAI	Rp 565,640,000.00	Rp 104,832,467.00	Rp 670,472,467.00
59	TEBAS	SEMPALAI	Rp 565,640,000.00	Rp 49,557,231.00	Rp 615,197,231.00
60	TEBAS	BEKUT	Rp 565,640,000.00	Rp 32,366,436.00	Rp 598,006,436.00
61	TEBAS	SEBERKAT	Rp 565,640,000.00	Rp 60,881,367.00	Rp 626,521,367.00
62	TEBAS	SEJIRAM	Rp 565,640,000.00	Rp 37,378,765.00	Rp 603,018,765.00
63	TEBAS	MAKRAMPAI	Rp 565,640,000.00	Rp 52,428,925.00	Rp 618,068,925.00
64	TEBAS	MEKAR SEKUNTUM	Rp 565,640,000.00	Rp 51,105,696.00	Rp 616,745,696.00
65	TEBAS	MENSERE	Rp 565,640,000.00	Rp 55,635,501.00	Rp 621,275,501.00
66	TEBAS	PUSAKA	Rp 565,640,000.00	Rp 51,167,845.00	Rp 616,807,845.00
67	TEBAS	SEGEDONG	Rp 565,640,000.00	Rp 41,600,990.00	Rp 607,240,990.00
68	TEBAS	SUNGAI KELAMBU	Rp 565,640,000.00	Rp 41,670,733.00	Rp 607,310,733.00
69	TEBAS	SERUMPUN BULUH	Rp 565,640,000.00	Rp 43,875,273.00	Rp 609,515,273.00
70	TEBAS	PANGKALAN KONGSI	Rp 565,640,000.00	Rp 61,215,462.00	Rp 626,855,462.00
71	TEBAS	DUNGUN PERAPAKAN	Rp 565,640,000.00	Rp 49,057,827.00	Rp 614,697,827.00
72	TEBAS	BATU MAKJAGE	Rp 565,640,000.00	Rp 88,947,660.00	Rp 654,587,660.00
73	TEBAS	SERINDANG	Rp 565,640,000.00	Rp 39,980,761.00	Rp 605,620,761.00
74	TEBAS	BUKIT SIGOLER	Rp 565,640,000.00	Rp 48,854,163.00	Rp 614,494,163.00
75	TEBAS	MATANG LABONG	Rp 565,640,000.00	Rp 70,644,246.00	Rp 636,284,246.00
76	TEBAS	MAKTANGGUK	Rp 565,640,000.00	Rp 33,643,976.00	Rp 599,283,976.00
77	TEBAS	SEGARAU PARIT	Rp 565,640,000.00	Rp 56,550,519.00	Rp 622,190,519.00
78	TEBAS	MARIBAS	Rp 565,640,000.00	Rp 47,342,936.00	Rp 612,982,936.00
79	TEBAS	SERET AYON	Rp 565,640,000.00	Rp 62,901,304.00	Rp 628,541,304.00
80	PEMANGKAT	PEMANGKAT KOTA	Rp 565,640,000.00	Rp 175,615,065.00	Rp 741,255,065.00
81	PEMANGKAT	HARAPAN	Rp 565,640,000.00	Rp 114,460,592.00	Rp 680,100,592.00
82	PEMANGKAT	PENJAJAP	Rp 565,640,000.00	Rp 145,582,978.00	Rp 711,222,978.00
83	PEMANGKAT	JELUTUNG	Rp 565,640,000.00	Rp 78,765,531.00	Rp 644,405,531.00
84	PEMANGKAT	PERAPAKAN	Rp 565,640,000.00	Rp 72,893,163.00	Rp 638,533,163.00
85	PEMANGKAT	SEBATUAN	Rp 565,640,000.00	Rp 25,531,105.00	Rp 591,171,105.00
86	PEMANGKAT	GUGAH SEJAHTERA	Rp 565,640,000.00	Rp 31,634,581.00	Rp 597,274,581.00
87	PEMANGKAT	LONAM	Rp 565,640,000.00	Rp 24,623,322.00	Rp 590,263,322.00
88	SEJANGKUNG	SULUNG	Rp 565,640,000.00	Rp 42,815,152.00	Rp 608,455,152.00
89	SEJANGKUNG	PENAKALAN	Rp 565,640,000.00	Rp 38,587,837.00	Rp 604,227,837.00
90	SEJANGKUNG	SEKUDUK	Rp 565,640,000.00	Rp 46,239,449.00	Rp 611,879,449.00
91	SEJANGKUNG	SETALIK	Rp 565,640,000.00	Rp 45,607,990.00	Rp 611,247,990.00
92	SEJANGKUNG	PARIT RAJA	Rp 565,640,000.00	Rp 47,235,510.00	Rp 612,875,510.00
93	SEJANGKUNG	PIANTUS	Rp 565,640,000.00	Rp 46,660,746.00	Rp 612,300,746.00
94	SEJANGKUNG	PERIGI LANDU	Rp 565,640,000.00	Rp 35,776,604.00	Rp 601,416,604.00
95	SEJANGKUNG	SENDOYAN	Rp 565,640,000.00	Rp 78,653,239.00	Rp 644,293,239.00
96	SEJANGKUNG	SENUJUH	Rp 565,640,000.00	Rp 60,143,103.00	Rp 625,783,103.00
97	SEJANGKUNG	PERIGI LIMUS	Rp 565,640,000.00	Rp 51,865,048.00	Rp 617,505,048.00
98	SEJANGKUNG	SEMANGGA	Rp 565,640,000.00	Rp 86,385,085.00	Rp 652,025,085.00
99	SEJANGKUNG	SEPANTAI	Rp 565,640,000.00	Rp 42,359,560.00	Rp 607,999,560.00
100	SELAKAU	SEMELAGI BESAR	Rp 565,640,000.00	Rp 90,688,986.00	Rp 656,328,986.00
101	SELAKAU	SUNGAI DAUN	Rp 565,640,000.00	Rp 67,141,054.00	Rp 632,781,054.00
102	SELAKAU	SUNGAI RUSA	Rp 565,640,000.00	Rp 65,157,696.00	Rp 630,797,696.00
103	SELAKAU	SUNGAI NYIRIH	Rp 565,640,000.00	Rp 64,850,138.00	Rp 630,490,138.00
104	SELAKAU	KUALA	Rp 565,640,000.00	Rp 60,849,025.00	Rp 626,489,025.00
105	SELAKAU	PARIT BARU	Rp 565,640,000.00	Rp 106,870,577.00	Rp 672,510,577.00
106	SELAKAU	TWI MENTIBAR	Rp 565,640,000.00	Rp 69,311,323.00	Rp 634,951,323.00
107	SELAKAU	BENTUNAI	Rp 565,640,000.00	Rp 79,263,943.00	Rp 644,903,943.00
108	SELAKAU	PANGKALAN BEMBAN	Rp 565,640,000.00	Rp 88,885,204.00	Rp 654,525,204.00
109	SELAKAU	PARIT KONGSI	Rp 565,640,000.00	Rp 57,263,587.00	Rp 622,903,587.00
110	SELAKAU	GAYUNG BERSAMBUT	Rp 565,640,000.00	Rp 60,877,790.00	Rp 626,517,790.00
111	PALOH	SEBUBUS	Rp 565,640,000.00	Rp 174,559,363.00	Rp 740,199,363.00
112	PALOH	NIBUNG	Rp 565,640,000.00	Rp 38,153,872.00	Rp 603,793,872.00
113	PALOH	MALEK	Rp 565,640,000.00	Rp 36,085,792.00	Rp 601,725,792.00
114	PALOH	TANAH HITAM	Rp 565,640,000.00	Rp 36,765,870.00	Rp 602,405,870.00
115	PALOH	MATANG DANAU	Rp 565,640,000.00	Rp 50,736,127.00	Rp 616,376,127.00
116	PALOH	KALIMANTAN	Rp 565,640,000.00	Rp 46,440,299.00	Rp 612,080,299.00
117	PALOH	TEMAJUK	Rp 565,640,000.00	Rp 30,657,579.00	Rp 596,297,579.00
118	PALOH	MENTIBAR	Rp 565,640,000.00	Rp 50,171,773.00	Rp 615,811,773.00
119	SAJINGAN BESAR	KALIAU'	Rp 565,640,000.00	Rp 38,001,122.00	Rp 603,641,122.00
120	SAJINGAN BESAR	SEBUNGA	Rp 565,640,000.00	Rp 47,553,582.00	Rp 613,193,582.00
121	SAJINGAN BESAR	SANTABAN	Rp 565,640,000.00	Rp 55,165,213.00	Rp 620,805,213.00

122	SAJINGAN BESAR	SENATAB	Rp 565,640,000.00	Rp 58,530,806.00	Rp 624,170,806.00
123	SAJINGAN BESAR	SUNGAI BENING	Rp 565,640,000.00	Rp 67,777,412.00	Rp 633,417,412.00
124	SUBAH	BALAI GEMURUH	Rp 565,640,000.00	Rp 46,630,319.00	Rp 612,270,319.00
125	SUBAH	SUNGAI SAPA'	Rp 565,640,000.00	Rp 32,768,680.00	Rp 598,408,680.00
126	SUBAH	MADAK	Rp 565,640,000.00	Rp 41,493,779.00	Rp 607,133,779.00
127	SUBAH	SABUNG	Rp 565,640,000.00	Rp 33,133,974.00	Rp 598,773,974.00
128	SUBAH	TEBUAH ELOK	Rp 565,640,000.00	Rp 65,953,441.00	Rp 631,593,441.00
129	SUBAH	SUNGAI DEDEN	Rp 565,640,000.00	Rp 39,515,441.00	Rp 605,155,441.00
130	SUBAH	BUKIT MULYA	Rp 565,640,000.00	Rp 33,076,257.00	Rp 598,716,257.00
131	SUBAH	MUKTI RAHARJA	Rp 565,640,000.00	Rp 31,004,107.00	Rp 596,644,107.00
132	SUBAH	SEMPURNA	Rp 565,640,000.00	Rp 29,179,233.00	Rp 594,819,233.00
133	SUBAH	MENSADE	Rp 565,640,000.00	Rp 44,538,141.00	Rp 610,178,141.00
134	SUBAH	KARABAN JAYA	Rp 565,640,000.00	Rp 78,085,244.00	Rp 643,725,244.00
135	GALING	SAGU	Rp 565,640,000.00	Rp 57,722,276.00	Rp 623,362,276.00
136	GALING	SUNGAI PALAH	Rp 565,640,000.00	Rp 41,021,871.00	Rp 606,661,871.00
137	GALING	GALING	Rp 565,640,000.00	Rp 43,142,835.00	Rp 608,782,835.00
138	GALING	TEMPAPAN KUALA	Rp 565,640,000.00	Rp 43,890,464.00	Rp 609,530,464.00
139	GALING	TEMPAPAN HULU	Rp 565,640,000.00	Rp 65,842,085.00	Rp 631,482,085.00
140	GALING	RATU SEPUDAK	Rp 565,640,000.00	Rp 38,213,516.00	Rp 603,853,516.00
141	GALING	TRI KEMBANG	Rp 565,640,000.00	Rp 52,071,731.00	Rp 617,711,731.00
142	GALING	TRI GADU	Rp 565,640,000.00	Rp 46,988,053.00	Rp 612,628,053.00
143	GALING	TELUK PANDAN	Rp 565,640,000.00	Rp 48,304,557.00	Rp 613,944,557.00
144	GALING	SUANG	Rp 565,640,000.00	Rp 45,484,290.00	Rp 611,124,290.00
145	TEKARANG	TEKARANG	Rp 565,640,000.00	Rp 43,602,744.00	Rp 609,242,744.00
146	TEKARANG	MERUBUNG	Rp 565,640,000.00	Rp 58,005,389.00	Rp 623,645,389.00
147	TEKARANG	CEPALA	Rp 565,640,000.00	Rp 61,080,978.00	Rp 626,720,978.00
148	TEKARANG	SARI MAKMUR	Rp 565,640,000.00	Rp 63,479,387.00	Rp 629,119,387.00
149	TEKARANG	RAMBAYAN	Rp 565,640,000.00	Rp 46,250,923.00	Rp 611,890,923.00
150	TEKARANG	SEMPADIAN	Rp 565,640,000.00	Rp 80,330,424.00	Rp 645,970,424.00
151	TEKARANG	MATANG SEGARAU	Rp 565,640,000.00	Rp 47,813,652.00	Rp 613,453,652.00
152	SEMPARUK	SINGA RAYA	Rp 565,640,000.00	Rp 76,120,906.00	Rp 641,760,906.00
153	SEMPARUK	SEMPARUK	Rp 565,640,000.00	Rp 80,890,159.00	Rp 646,530,159.00
154	SEMPARUK	SEPINGGAN	Rp 565,640,000.00	Rp 71,864,236.00	Rp 637,504,236.00
155	SEMPARUK	SEPADU	Rp 565,640,000.00	Rp 57,467,958.00	Rp 623,107,958.00
156	SEMPARUK	SEBURING	Rp 565,640,000.00	Rp 65,247,805.00	Rp 630,887,805.00
157	SAJAD	JIRAK	Rp 565,640,000.00	Rp 47,695,238.00	Rp 613,335,238.00
158	SAJAD	TENGGULI	Rp 565,640,000.00	Rp 67,903,318.00	Rp 633,543,318.00
159	SAJAD	MEKAR JAYA	Rp 565,640,000.00	Rp 113,670,415.00	Rp 679,310,415.00
160	SAJAD	BERINGIN	Rp 565,640,000.00	Rp 69,431,434.00	Rp 635,071,434.00
161	SEBAWI	RANTAU PANJANG	Rp 565,640,000.00	Rp 27,997,303.00	Rp 593,637,303.00
162	SEBAWI	TEBING BATU	Rp 565,640,000.00	Rp 52,855,244.00	Rp 618,495,244.00
163	SEBAWI	SEBAWI	Rp 565,640,000.00	Rp 50,726,802.00	Rp 616,366,802.00
164	SEBAWI	SEPUK TANJUNG	Rp 565,640,000.00	Rp 56,023,064.00	Rp 621,663,064.00
165	SEBAWI	SEBANGUN	Rp 565,640,000.00	Rp 44,838,118.00	Rp 610,478,118.00
166	SEBAWI	SEMPALAI SEBEDANG	Rp 565,640,000.00	Rp 48,709,195.00	Rp 614,349,195.00
167	SEBAWI	TEMPATAN	Rp 565,640,000.00	Rp 42,234,767.00	Rp 607,874,767.00
168	JAWAI SELATAN	JAWAI LAUT	Rp 565,640,000.00	Rp 48,398,203.00	Rp 614,038,203.00
169	JAWAI SELATAN	JELU AIR	Rp 565,640,000.00	Rp 47,556,841.00	Rp 613,196,841.00
170	JAWAI SELATAN	MATANG TERAP	Rp 565,640,000.00	Rp 59,220,395.00	Rp 624,860,395.00
171	JAWAI SELATAN	SUAH API	Rp 565,640,000.00	Rp 38,369,191.00	Rp 604,009,191.00
172	JAWAI SELATAN	SARI LABA A	Rp 565,640,000.00	Rp 29,715,320.00	Rp 595,355,320.00
173	JAWAI SELATAN	SARI LABA B	Rp 565,640,000.00	Rp 35,262,892.00	Rp 600,902,892.00
174	JAWAI SELATAN	SEMPERIUUK A	Rp 565,640,000.00	Rp 40,743,507.00	Rp 606,383,507.00
175	JAWAI SELATAN	SEMPERIUUK B	Rp 565,640,000.00	Rp 43,572,416.00	Rp 609,212,416.00
176	JAWAI SELATAN	SABARAN	Rp 565,640,000.00	Rp 41,449,437.00	Rp 607,089,437.00
177	TANGARAN	TANGARAN	Rp 565,640,000.00	Rp 47,114,153.00	Rp 612,754,153.00
178	TANGARAN	SIMPANG EMPAT	Rp 565,640,000.00	Rp 83,295,507.00	Rp 648,935,507.00
179	TANGARAN	MERABUAN	Rp 565,640,000.00	Rp 36,138,285.00	Rp 601,778,285.00
180	TANGARAN	SEMATA	Rp 565,640,000.00	Rp 52,502,550.00	Rp 618,142,550.00
181	TANGARAN	MERPATI	Rp 565,640,000.00	Rp 47,378,389.00	Rp 613,018,389.00
182	TANGARAN	PANCUR	Rp 565,640,000.00	Rp 59,027,193.00	Rp 624,667,193.00
183	TANGARAN	ARUNG PARAK	Rp 565,640,000.00	Rp 57,702,548.00	Rp 623,342,548.00
184	TANGARAN	ARUNG MEDANG	Rp 565,640,000.00	Rp 39,037,669.00	Rp 604,677,669.00
185	SALATIGA	PARIT BARU	Rp 565,640,000.00	Rp 89,441,112.00	Rp 655,081,112.00
186	SALATIGA	SUNGAI TOMAN	Rp 565,640,000.00	Rp 77,820,231.00	Rp 643,460,231.00
187	SALATIGA	SERUNAI	Rp 565,640,000.00	Rp 68,804,008.00	Rp 634,444,008.00
188	SALATIGA	SERUMPUN	Rp 565,640,000.00	Rp 61,923,760.00	Rp 627,563,760.00
189	SALATIGA	SALATIGA	Rp 565,640,000.00	Rp 100,155,640.00	Rp 665,795,640.00



190	SELAKAU TIMUR	GELIK	Rp 565,640,000.00	Rp 55,526,066.00	Rp 621,166,066.00
191	SELAKAU TIMUR	SERANGGAM	Rp 565,640,000.00	Rp 60,234,753.00	Rp 625,874,753.00
192	SELAKAU TIMUR	SELAKAU TUA	Rp 565,640,000.00	Rp 111,175,740.00	Rp 676,815,740.00
193	SELAKAU TIMUR	BUDUK SEMPADANG	Rp 565,640,000.00	Rp 54,637,990.00	Rp 620,277,990.00
<b>Total</b>			<b>Rp 109,168,520,000.00</b>	<b>Rp 10,681,657,000.00</b>	<b>Rp 119,850,177,000.00</b>

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas

Pada tanggal 29 Desember 2015

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

ARLIZEN, AB

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 57

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN PERUNDANG-UNDANGAN

MARIANIS

Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003